Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial
Volume 3, Nomor 3 , Oktober 2025, Halaman 9-18
E-ISSN: 3025-6704
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.17232436

Kontribusi (*Indian Ocean Rim Association*) IORA Dalam Memberdayakan Poros Maritim Indonesia Melalui Blue Economy

Aulya Ananda[1] , Ruben Binsar[2] , Nasywa Izra[3]
[123] Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

A R T I C L E I N F O

Article history:
Received September 20, 2025
Revised 25 September 2025
Accepted 25 September 2025
Available online 01 Oktober. 2025

Keywords:
Indian Ocean Rim Association, Ekonomi Biru, Diplomasi Maritim, Poros Maritim Dunia, Kepentingan Nasional, Kerja Sama Regional.
Keywords:
Indian Ocean Rim Association, Blue Economy, Maritime Diplomacy, Global Maritime Fulcrum, National Interests, Regional Cooperation.

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

A B S T R A C T

Artikel ini menganalisis bagaimana kontribusi Indian Ocean Rim Association (IORA) dalam pengembangan Blue Economy di Indonesia. Sebagai kepulauan terbesar, Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang melimpah, namun kontribusinya terhadap PDB nasional masih belum optimal. Presiden Joko Widodo memperkenalkan strategi besar Poros Maritim Dunia (PMD) pada tahun 2014 yang memiliki tujuan mengoptimalkan seluruh potensi kelautan negara. Penelitian ini mengkaji bagaimana kepemimpinan Indonesia di IORA periode 2015-2017 yang berfungsi sebagai forum strategis untuk menjaga kepentingan maritim nasionalnya. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam menganalisis penelitian ini, dengan menggunakan teori Liberalisme Institutionalism untuk menjabarkan bagaimana kontribusi IORA sebagai forum strategis regional, serta Epistemic Infrastructure untuk menganalisis tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendukung keamanan dan pertumbuhan ekonomi maritim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IORA berfungsi sebagai wadah strategis bagi Indonesia dalam upaya memperkuat diplomasi maritim, mengembangkan kerja sama blue economy, mencegah IUU Fishing, dan meningkatkan pengelolaan sumber daya laut. Jakarta Concord dan IORA Blue Carbon Hub menunjukkan bagaimana kerja sama internasional dapat memperkuat visi dari poros maritim dunia dan meningkatkan status Indonesia sebagai aktor penting dalam tata kelola maritim kawasan Samudra Hindia.

A B S T R A C T

This article analyzes the contribution of the Indian Ocean Rim Association (IORA) to the development of the Blue Economy in Indonesia. As the largest archipelago, Indonesia has abundant marine resources, but their contribution to the national GDP is still not optimal. President Joko Widodo introduced the grand strategy of the Global Maritime Fulcrum (PMD) in 2014, which aims to optimize all of the country's marine potential. This study examines how Indonesia's leadership in IORA during the 2015-2017 period served as a strategic forum for safeguarding its national maritime interests. A descriptive qualitative approach was used in analyzing this research, using Institutional Liberalism theory to describe how IORA contributes as a regional strategic forum, as well as Epistemic Infrastructure to analyze the importance of science and technology in supporting maritime security and economic growth. The results of the study show that IORA serves as a strategic platform for Indonesia in its efforts to strengthen maritime diplomacy, develop blue economy cooperation, prevent IUU Fishing, and improve marine resource management. The Jakarta Concord and IORA Blue Carbon Hub demonstrate how international cooperation can strengthen the vision of the world's maritime axis and enhance Indonesia's status as an important actor in the maritime governance of the Indian Ocean region.

PENDAHULUAN

Indonesia dipandang sebagai negara dengan sumber daya lautnya yang melimpah. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki ribuan pulau dan garis pantai yang luas, Indonesia memiliki potensi yang unggul dan komparatif dalam memanfaatkan sumber daya laut dan pesisirnya. Oleh karena itu muncul konsep *blue economy* atau ekonomi biru dimana konsep tersebut menekankan pemanfaatan keberlanjutan terhadap potensi laut Indonesia sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan yang sepaham dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) nomor 14.7 dari United Nation (2015) (Insight Samudera Indonesia, 2023). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Insight Samudera Indonesia 2023 dan didukung dengan data dari Bank Dunia (2019), potensi *Blue Economy* di Indonesia diperkirakan telah mencapai USD 280 miliar per tahun, akan tetapi dalam realitanya kontribusi *Blue Economy* dalam Produk Domestik Bruto (PDB) nasional masih sangat jauh dari angka tersebut.

*Corresponding Author

Menurut data, pada tahun 2022 sektor tersebut hanya menyumbang sekitar USD 79 miliar atau hanya sekitar 6% dari PDB Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa pencapaian *blue economy* baru mencapai sekitar 28% dari total potensi yang terpantau (Insight Samudera Indonesia, 2023).

Menyempurnakan data tersebut, sebuah laporan dari *World Bank* mempertegas bahwa sumber daya laut dan pesisir Indonesia yang tercapai lebih dari USD 280 miliar per tahun ini menunjukkan sekitar seperempat dari total aktivitas ekonomi nasional (World Bank, 2019). Dengan demikian menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi keluatan yang sangat luas dan strategis untuk menunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Meskipun Indonesia memiliki potensi yang besar dan kuat pada sumber daya lautnya, Indonesia tetap memiliki tantangan yang krusial terhadap sektor ini. Beberapa tantangan tersebut adalah seperti praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, penurunan kualitas ekosistem terumbu karang, mangrove, dan vegetasi pesisir lainnya. Disamping itu, isu lainnya seperti polusi laut dan limbah plastik juga merupakan tantangan yang sulit untuk diminimalisir. Tantangan tersebut tidak hanya berdampak pada kerusakan ekosistem namun juga mengurangi peluang ekonomi yang akan dihasilkan dari laut. (ICCTF & Bappenas, 2022).

Sehingga sebagai respons pemerintah Indonesia melalui Bappenas tersusunnya Indonesia *Blue Economy Roadmap* 2023-2045, tujuan dari adanya konsep tersebut adalah untuk meningkatkan pertumbuhan *Blue Economy* melalui empat proses atau strategi utama dan lima fase pertumbuhan atau pengembangan. Harapan dari Indonesia *Blue Economy Roadmap* 2023-2045 ini agar dapat menaikkan kontribusi sektor tersebut sekitar 12-15 % dari PDB menjelang tahun 2045 (Insight Samudera Indonesia, 2023). Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa memberi tanggapan tentang tantangan utama dalam memberdayakan *Blue Economy* adalah kontribusinya terhadap PDB masih tergolong rendah, yaitu berkisar 7% bahkan lebih rendah daripada laju pertumbuhan nasional (bakabar, 2023). Isu yang muncul dalam implementasi *Blue Economy* dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tingginya tingkat kemiskinan di wilayah pesisir ini merupakan isu yang krusial mengingat dengan semakin tingginya tingkat kemiskinan tersebut dapat melemahkan kesadaran masyarakat dalam memberdayakan *Blue Economy*.
2. Isu pengelolaan limbah plastik, jumlah limbah plastik yang dihasilkan di Indonesia sudah mencapai lebih dari 70,8 juta ton per tahun yang tercatat pada awal 2025. Berdasarkan data laporan Media Indonesia (2025) menyebutkan bahwa 38% limbah tersebut belum terkelola dengan baik. Sedangkan sisanya terkelola di TPA, hal tersebut menyebabkan TPA di Indonesia sudah melebihi kapasitas (Media Indonesia, 2025)
3. Dampak perubahan iklim, terancamnya ekosistem pesisir yang diakibatkan oleh banjir dan habitat alami semakin rusak. Terlebih lagi per Juni 2023 terjadi kenaikan permukaan air laut tercatat 4,0 mm (Bakabar, 2023).

Melihat kondisi tersebut, maka diperlukan strategi yang tepat dalam menanggulangi isu tersebut. Lahirnya konsep *Blue Economy* ini merupakan solusi yang relevan dalam merespon segala tantangan yang ada di Indonesia, dimana konsep tersebut menekankan strategi yang inklusif, berkelanjutan dan teruji dalam pengetahuan serta riset. Posisi Indonesia sangat strategis yaitu terletak diantara dua benua (Asia dan Australia), serta dua samudra (Hindia dan Pasifik). Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat strategis sehingga sekitar 40% perdagangan dunia melewati perairan Indonesia. Dengan letak geografis yang strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai jalur perdagangan global tersebut maka dapat diartikan bahwa laut bukanlah penghalang atau pemisah, justru sebagai penghubung antar negara untuk memperkuat posisi Indonesia dalam kompetisi global. Garis sejarah yang terlukis dalam sejarah panjang kemaritiman Indonesia, sudah tercermin sejak kerajaan sriwijaya dan majapahit.

Zaman sriwijaya dan majapahit menjadi tonggak sejarah yang menunjukkan kuatnya identitas bangsa ini sebagai bangsa maritim. Akan tetapi tantangan pasti muncul seiring dengan perkembangannya, melihat potensi yang besar belum dikelola dengan optimal. Isu seperti penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, kerusakan lingkungan laut dan minimnya infrastruktur maritim masih menjadi isu krusial untuk dihadapi. Paradigma pembangunan nasional biasanya terlalu berfokus di daratan sehingga seringkali mengabaikan sektor kelautan, sehingga kontribusi terhadap perekonomian belum ditahap yang maksimal. Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 merespons isu tersebut dengan mencetuskan Visi Poros Maritim Dunia (PMD) sebagai Grand Strategy Indonesia guna mengembalikan identitas bangsa Indonesia sebagai grand strategy Indonesia yang diharapkan dapat mengembalikan identitas bangsa yang dikenal sebagai bangsa maritim. Visi ini tercantum pada Peraturan Presiden NO. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 dan Peraturan Presiden NO. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Visi PMD ini bergantung pada lima pilar utama yaitu: Membangun budaya maritim, Menjaga dan mengelola sumber daya laut yang berkelanjutan, Mengembangkan infrastruktur dan konektivitas maritim, Memperkuat diplomasi kemaritiman, Meningkatkan pertahanan serta keamanan maritim.

Harapan presiden dalam mencetuskan visi ini adalah agar arah pembangunan nasional Indonesia lebih berbasis maritim. Poros Maritim Dunia dipandang sebagai respons strategis mengingat hambatan global serta sebagai alat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, makmur dan memberikan pengaruh yang kuat dalam kompetisi internasional melalui pemanfaatan kekuatan maritimnya. Melihat konteks tersebut, Indian Ocean Rim Association (IORA) menjadi forum regional yang strategis dan penting. IORA adalah satu-satunya organisasi antar pemerintah yang menaungi negara-negara pesisir Samudra Hindia, kawasan tersebut memiliki kontribusi ekonomi global yang besar karena dijadikan sebagai jalur pelayaran perdagangan dari Asia ke Afrika-Eropa dan sebaliknya (Nisa, 2020). Indonesia juga menegaskan peran strategisnya di IORA saat menduduki posisi sebagai ketua selama periode 2015-2017. Dengan partisipasinya sebagai ketua di forum strategis IORA tersebut menjadi tonggak pencapaian Indonesia dalam menyebarkan diplomasi maritimnya di kawasan Samudra Hindia, serta peran media untuk mewujudkan visi yang besar dalam Poros Maritim Dunia. Dengan membawa tema "Strengthening *Maritime Cooperation in a Peaceful and Stable Indian Ocean,* Indonesia berhasil mengarahkan arah kebijakan IORA, termasuk pelaksanaan KTT IORA pertama di Jakarta pada tahun 2017 yang membuahkan hasil *Jakarta Concord* sebagai tonggak sejarah penting dalam upaya kerja sama di kawasan (Nisa, 2020). Selain itu, terdapat kesinambungan antara lima pilar Poros Maritim Dunia dengan enam prioritas strategis IORA. korelasi tersebut meliputi tiga ranah utama, yaitu : politik dan keamanan maritim, ekonomi melalui investasi perdagangan serta *Blue Economy*, serta kerja sama sosial dan budaya. Hal tersebut memberikan peluang bagi Indonesia untuk terus memperjuangkan kepentingan nasionalnya di ranah internasional serta meningkatkan citra positif diplomasi maritim Indonesia. Dengan begitu, IORA tidak hanya dijadikan sebagai forum kerja sama regional namun juga sebagai alat dan instrumen yang strategis bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya di Samudra Hindia, implementasi PMD serta meningkatkan daya tawar dalam tata kelola geopolitik global.

Fokus penelitian ini ada pada analisis *Indian Ocean Rim Association* (IORA) sebagai forum regional strategis untuk mendukung proses implementasi Visi Poros Maritim Dunia Indonesia serta kontribusinya terhadap pengembangan *Blue Economy* nasional. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan pada dua aspek utama, yaitu:

1. Sejauh mana IORA berkontribusi pada penguatan pilar-pilar Poros Maritim Dunia Indonesia, khususnya kontribusi IORA terhadap pengelolaan sumber daya laut, pembangunan infrastruktur, diplomasi, bidang budaya maritim, serta pertahanan dan keamanan maritim.
2. Dalam hal apa IORA mendukung pertumbuhan *Blue Economy* Indonesia, melalui kerja sama regional di bidang perdagangan, investasi, pengelolaan perikanan, konferensi *Blue Economy*, serta inisiatif *Blue Carbon*.

LANDASAN TEORI

Penelitian ini akan menggunakan dua kerangka teori utama, yaitu teori Liberalisme Institusional dan *Regime Theory.* Kedua teori ini dipilih karena relevan dengan topik yang dibahas yaitu peran IORA dalam mendukung visi Poros Maritim Dunia Indonesia serta pengembangan *Blue Economy.*

Liberal Institutionalism

Liberalisme Institusional merupakan salah satu teori Hubungan Internasional yang beranggapan bahwa “Lembaga internasional mampu memfasilitasi kerja sama antarnegara walaupun sistem internasionalnya bersifat anarkis” (Liberalisme institusional, 2024). Pendekatan ini berasumsi bahwa negara adalah memiliki tujuan dan kepentingan yang jelas untuk melakukan kerja sama, terutama jika hubungan timbal balik tersebut memberikan keuntungan bagi negara. Dalam hal tersebut, lembaga internasional memiliki peran yang penting untuk mengurangi ketidakpastian, meminimalisir biaya transaksi, memberikan mekanisme yang jelas saat penyelesaian konflik, serta memperkuat transparansi dan menumbuhkan kepercayaan antarnegara. Dalam topik penelitian ini, pendekatan Liberalisme institusional menjadi kerangka teoritis yang relevan dalam menjelaskan bagaimana peran *Indian Ocean Rim Association* (IORA) dijalankan.

Sebagai forum regional, IORA mewadahi koordinasi antarnegara di pesisir Samudra Hindia melalui pembentukan norma, forum diplomasi maritim, dan tata cara kerja sama maritim. Hal tersebut selaras dengan visi PMD Indonesia yang berfokus pada pentingnya pengelolaan sumber daya laut, pembangunan infrastruktur, diplomasi, bidang budaya maritim, serta pertahanan dan keamanan maritim. Disamping itu, liberalisme institusional juga digunakan untuk memperkuat dukungan IORA terhadap pengambangan *Blue Economy* Indonesia. Melewati forum ini, Indonesia dapat memperkuat kerjasamanya di bidang perdagangan, investasi, perikanan, konferensi *Blue Economy,* dan inisiatif lingkungan seperti *Blue Carbon.* Dengan demikian, teori ini menekankan bahwa IORA tak hanya dipandang sebagai forum komunikasi antarnegara namun juga sebagai alat dan instrumen institusional yang perannya untuk mendukung strategi maritim Indonesia dalam kerja sama internasional yang bersifat mutualisme.

Epistemic Infrastructure

Epistemic Infrastructure merupakan suatu struktur sosial-material yang membentuk dasar dari produksi, pertukaran, pengumpulan, dan penggunaan pengatahuan mengenai laut dan aktivitas maritim. Infrastruktur ini meliputi sistem pengumpulan data, teknologi pemantauan laut, mekanisme regulasi, standar internasional, serta jaringan pertukaran informasi yang memberikan fasilitas pemahaman antaraktor. Hadirnya teori *epistemic infrastructure* ini memberikan pemahaman bahwa laut yang dulunya sulit untuk dilihat sekarang menjadi mudah untuk dipantau sehingga lebih mudah untuk dikelola dengan efektif dan berkelanjutan. Dalam konsep *blue economy,* cukup memberikan pemahaman tentang bagaimana pengembangan ekonomi berbasis laut sangat berkaitan dengan ketersediaan data yang konkrit, teknologi maritim modern yang memadai, serta ilmu ilmiah yang koheren. Pondasi pengetahuan yang tidak memadai maka kegiatan ekonomi seperti perikanan, pariwisata bahari, dan eksplorasi sumber daya laut akan mengalami overeksploitasi dan kerusakan ekosistem. *Epistemic Infrastructure* menekankan bahwa kebijakan *blue economy* tidak hanya sebagai diplomasi seremonial namun juga memastikan terjadinya pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan masyarakat pesisir (Bueger, 2024).

Epistemic Infrastructure memperkuat keamanan maritim yang merupakan prasyarat utama keberhasilan *blue economy.* Dengan sistem pemantauan yang efektif kuat dan data yang memadai maka ancaman seperti polusi laut, penyeludupan, kerusakan infrastruktur maritim dan penangkapan ikan ilegal dapat ditangani lebih cepat. Hal tersebut memberikan situasi laut yang aman dan stabil sehingga kegiatan ekonomi maritim dapat tumbuh dengan baik dan berkelanjutan. Dengan demikian, *Epistemic Infrastructure* merupakan teori yang memberikan konsep yang terstruktur dalam menjelaskan keterkaitan antara pengetahuan, keamanan maritim, dan pengembangan *blue economy* yang inklusif dan berkelanjutan (Bueger, 2024).

HASIL

Kontribusi IORA dalam Pertumbuhan Blue Economy Indonesia

a. IORA sebagai Kerangka Normatif dan Diplomasi Maritim

IORA dipandang sebagai kerangka normatif dan platform diplomasi maritim bagi Indonesia. Sebagai forum multilateral, IORA berfungsi sebagai arena konsensus yang memberikan legitimasi internasional terhadap agenda *Blue Economy* Indonesia. Dalam kepemimpinannya, Indonesia berhasil mendorong IORA untuk mengadopsi konsep *Blue Economy* sebagai area fokus lintas sektoral. Puncaknya adalah *Jakarta Concord* pada tahun 2017, yang secara eksplisit menekankan manfaat *Blue Economy* sebagai pendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan Samudra Hindia. Pada tingkat kebijakan domestik, deklarasi seperti *Jakarta Concord* menjadi rujukan penting. Dokumen ini selaras dengan Indonesia *Blue Economy Roadmap* 2023-2045 yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas, yang juga berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya laut Indonesia. Melalui IORA, Indonesia mengartikulasikan dan mendapatkan dukungan bagi prinsip-prinsip ini, seperti pengelolaan perikanan berkelanjutan, peningkatan pariwisata bahari, dan investasi ramah lingkungan.

Selain itu, IORA memfasilitasi diplomasi maritim kooperatif dan persuasif Indonesia. Contohnya, Indonesia menginisiasi berbagai pertemuan, simposium, dan lokakarya, seperti *The 3rd Indian Ocean Dialogue, IORA Business Innovation Center* (BIC), dan *The 2nd Blue Economy Ministerial Conference*. Upaya ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk meningkatkan visibilitas IORA dan agenda ekonomi birunya. Diplomasi ini memungkinkan Indonesia untuk mempromosikan model pembangunan maritim yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan ekologi. Dengan terlibat aktif, Indonesia berhasil mendapatkan kepercayaan dari negara-negara anggota lain, yang tercermin dari apresiasi atas kepemimpinannya dan kontribusinya dalam meningkatkan standar IORA.

b. Kontribusi IORA dalam Poros Maritim Indonesia

Hubungan IORA dengan Poros Maritim Dunia (PMD) Indonesia sangatlah sinergis. Kebijakan PMD yang memiliki lima pilar utama memiliki keselarasan dengan enam area prioritas kerjasama IORA dan dua area fokus lintas sektoralnya. Keselarasan ini terjadi di tiga ranah fundamental: politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya.

A. Budaya Maritim

Pilar pertama PMD adalah membangun kembali budaya maritim Indonesia. IORA, melalui area prioritas pariwisata dan pertukaran budaya, memberikan platform bagi Indonesia untuk memperkuat identitasnya sebagai bangsa maritim. Indonesia menyelenggarakan acara seperti IORAG Cultural Expo dan simposium tentang persimpangan budaya dan peradaban di Samudra Hindia. Kegiatan ini tidak hanya menampilkan kekayaan budaya Indonesia, tetapi juga meningkatkan kesadaran publik tentang peran IORA dan potensi

kelautan. Upaya ini berkontribusi pada pilar PMD dengan revitalisasi kesadaran masyarakat akan warisan dan potensi maritim mereka.

B. Pengelolaan Sumber Daya Laut
Pilar kedua PMD berorientasi pada tata kelola laut yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan area fokus IORA, Ekonomi Biru, yang mempromosikan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi sumber daya laut secara bijak dan inklusif. Indonesia mendorong kerja sama dalam manajemen perikanan untuk memberantas penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU Fishing). *IORA's Maritime Cooperative Declaration* juga mendukung upaya ini, yang berdampak positif pada kelestarian biota laut dan ekonomi nelayan Indonesia. Selain itu, IORA juga fokus pada manajemen risiko bencana dan pelestarian laut, yang berimplikasi langsung pada perlindungan ekosistem pesisir Indonesia.

C. Infrastruktur dan Konektivitas
Pilar ketiga PMD berfokus pada inovasi infrastruktur dan hubungan maritim, seperti program tol laut. Meskipun IORA tidak terlibat langsung dalam pembangunan fisik, forum ini memfasilitasi kerja sama perdagangan dan investasi bisnis (salah satu prioritas IORA) yang sangat diperlukan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur. Peluncuran inisiatif seperti *IORA Guide for Investment dan IORA Business Travel Card* (IBTC) bertujuan untuk memudahkan kegiatan bisnis antarnegara, yang secara tidak langsung mendukung konektivitas dan logistik maritim. Dengan meningkatkan iklim investasi di kawasan, IORA membantu Indonesia menarik modal yang diperlukan untuk pembangunan tol laut dan pelabuhan.

D. Diplomasi Maritim
Pilar keempat PMD, yaitu diplomasi maritim, adalah inti dari peran Indonesia di IORA. Indonesia secara aktif menggunakan IORA untuk memperjuangkan kepentingannya, seperti keamanan maritim dan isu-isu non-tradisional lainnya. Dengan tema *"Strengthening Maritime Cooperation in a Peaceful and Stable Indian Ocean,"* Indonesia berhasil mengarahkan agenda IORA ke isu-isu yang relevan dengan visi PMD-nya. Melalui forum ini, Indonesia dapat menjalin hubungan bilateral dan multilateral yang erat, yang merupakan kunci untuk menyelesaikan masalah bersama dan mencapai keuntungan kolektif. Dengan diplomasi maritim yang efektif, Indonesia tidak hanya mengamankan kepentingannya sendiri tetapi juga memajukan kerja sama regional yang lebih luas.

E. Keamanan Maritim
Pilar kelima PMD adalah membangun kekuatan pertahanan maritim. IORA memiliki prioritas khusus yang berfokus pada keselamatan dan keamanan maritim (*maritime safety and security*). Isu-isu yang dicakup termasuk pembajakan, perampokan bersenjata di laut, terorisme, serta eksploitasi sumber daya laut yang tidak berkelanjutan. Melalui IORA, Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan negara-negara anggota lain untuk menghadapi ancaman non tradisional ini, yang secara langsung berdampak pada keamanan perairan dan kelestarian lautnya. Dengan menjaga keamanan maritim di Samudra Hindia, IORA mendukung stabilitas lingkungan maritim Indonesia, yang sangat penting untuk kelancaran jalur perdagangan global yang melewati perairan Indonesia.

Geopolitik Samudra Hindia dan Posisi Indonesia dengan IORA

Jalesveva Jayamahe, sebuah slogan yang berarti "dilaut kita jaya". Ini menunjukkan tata kelola maritim merupakan ambisi kekuatan besar dunia. Samudra Hindia adalah arena kompetisi dunia yang menyediakan jalur pelayaran dan *check point* dari Bab el-Mandeb hingga Selat Malaka. Indonesia yang berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik menjadikan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) menjadi poros penting jalur pelayaran Indo-Pasifik. Dengan kontrol atas Selat Malaka, Selat Sunda dan Selat Lombok memberikan Indonesia keuntungan ekonomi dan diplomasi. Namun, posisi ini membuat negara negara besar membuka strategi untuk mengurangi ketergantungan terhadap ALKI, contohnya Amerika dengan strategi "Pivot to Asia" dan China dengan Kanal Kra. Hal ini memaksa Indonesia untuk menggunakan ideologi bebas aktif secara maksimal dengan mengambil peran sebagai *swing state* di Indo-Pasifik (N Fathiraini et al, 2022).

Mantan Presiden Joko Widodo menjadi presiden pertama yang memfokuskan Poros Maritim Dunia dalam masa kepemimpinannya, dimana fokusnya tidak hanya terkait pertahanan maritim namun juga pembangunan ekonomi. Menurut laporan Bank Dunia, biaya pengiriman kontainer dari Padang ke Jakarta sama dengan tiga kali Jakarta ke Singapura. Ini menunjukkan masih adanya kendala struktural dalam konsep pengembangan *blue economy*. Oleh karena itu, pembangunan pelabuhan di pulau pulau Indonesia menjadi prioritas dalam upaya mengintegrasikan perekonomian negara (Vibhanshu dan Joseph, 2014).

Melalui *Indian Ocean Rim Association* (IORA) serta *Jakarta Concord*, Indonesia memperkuat kebijakan kolektif untuk tata kelola laut dan pembangunan inklusif berbasis *blue economy*. Hal ini tentu saja mendorong Indonesia tidak hanya sebagai *rule taker* namun juga *agenda setter* sesuai dengan perannya yang memimpin kerjasama maritim Indo-Pasifik.

Puncak tren diplomasi biru Indonesia adalah ketika menjadi tuan rumah *IORA Blue Economy Conference II* (BEC-II) 2019 di Jakarta. Forum ini melibatkan *multi stakeholder* Indonesia serta bekerja sama dengan jejaring regional, hingga menghasilkan *Jakarta Declaration* (IORA, 2017). Forum ini menjadi arena Indonesia dalam menekankan diplomasi biru pada negara negara anggota. BEC-II mendorong posisi Indonesia sebagai hub normatif yang menggeser fokus isu Samudra Hindia dari keamanan menjadi pembangunan berkelanjutan. Hasil konferensi ini juga membuka jalur tindak lanjut yang spesifik melalui *work plan*, program pelatihan, dan proyek karbon biru untuk diadaptasi pada kebijakan domestik. Namun, BEC-II memiliki *implementation gap* yang sangat tergantung dari bagaimana Indonesia mampu menjembatani realitas sosial-ekonomi nasional dan global. Ini terlihat dari komitmen politik yang belum diimplementasikan pada proyek pembangunan berkelanjutan yang dapat langsung dirasakan masyarakat pesisir seperti para nelayan kecil, dimana fokus pembangunan pelabuhan hanya dirasakan para ekonom besar tanpa kesejahteraan masyarakat sekitar pelabuhan (Vibhanshu dan Joseph, 2014).

Tahun	Peristiwa	Aktor	Signifikasi
2015	Indonesia menjabat sebagai ketua IORA	Kemenlu dan Kemenko Marves	Memprioritaskan agenda *blue economy* di forum IORA
2016	Persiapan KTT IORA & BEC-II	Indonesia dan Sekretariat IORA	Penyusunan dasar kerjasama regional melalui *Jakarta Concord dan IORA Action Plan*
2017	KTT IORA & BAC-II Jakarta	Presiden RI, KKP, Kemenlu dan negara anggota IORA	Memperkuat diplomasi biru Indonesia dengan mengesahkan *Jakarta Declaration on Blue Economy*
2019	Peluncuran IORA *Blue Carb Hub*	Australia (DFAT), CSIRO, Indonesia	Membangun pusat riset karbon biru dan memperkuat diplomasi lingkungan
2023	*Think Tank Meeting Blue Carbon Hub*	Kemenko Marves, IORA, CSIRO	Menekankan *nature base solution* untuk adaptasi pesisir dan *climate change*
2024	*Workshop UU Fishing & Marine Debris* (Bali & La Reunion)	KKP, IORA CGFM, Prancis	Finalisasi pendoman regional pemberantasan *IUU Fishing*

Tabel 1 Linimasa Diplomasi Biru Indonesia melalui IORA (2015-2024)

Kepemimpinan Indonesia di IORA sejak 2015 menjadi simbolis kenaikan tren diplomasi maritim melalui agenda *blue economy*. Tren ini terus berlanjut dengan penyusunan *Jakarta Concord* dan IORA Action Plan pada 2016. Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai *agenda setter* dengan menjadi tuan rumah KTT IORA dan BEC-II Jakarta pada tahun 2017, hal ini menghasilkan J*akarta Declaration on the Blue Economy* yang sekaligus menegaskan diplomasi biru Indonesia. Pasca-2017 kolaborasi yang dibawa Indonesia untuk IORA menggaet mitra internasional, seperti Australia bersama CSIRO pada IORA *Blue Carbon Hub* dan *Think Tank* di Bali 2023 (IORA,2023). Hal ini, menunjukkan Indonesia menjadikan modal politik ini dan mengaitkannya ke infrastruktur dan pembiayaan. IORA *Blue Carbon Hub* ini memperkuat *epistemic community* untuk standarisasi metodologi dan proyek kredit karbon. Pada 2024 Indonesia kembali mengambil peran sentral dalam *Workshop IUU Fishing & Marine Debris* di Bali dan La Reunion (IORA, 2024). Dalam perspektif geopolitik, hal ini menunjukkan pergeseran diplomasi seremoni menjadi kapabilitas teknis. Namun, tantangannya adalah memastikan implementasinya dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir bukan *narrative power* semata.

Blue Carbon Diplomacy

Indonesia memiliki ekosistem mangrove terbesar di dunia, dengan luasan mencapai 3,31 juta hektare dan potensi serapan karbon sekitar 300 juta ton CO_2 per tahun (KLHK, 2023). Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai aktor kunci dalam diplomasi iklim, khususnya di kawasan Samudra Hindia. Melalui inisiatif IORA *Blue Carbon Hub* yang diluncurkan pada 2019 dan dikembangkan bersama Australia melalui *Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation* (CSIRO), Indonesia memanfaatkan posisinya untuk memimpin kerja sama regional dalam mitigasi perubahan iklim berbasis ekosistem pesisir. Program ini membuka ruang pertukaran pengetahuan, penyusunan standar metodologi, serta penguatan *epistemic community* untuk pengelolaan karbon biru secara terukur dan berkelanjutan.

Lebih jauh, keterlibatan Indonesia dalam IORA *Blue Carbon Hub* juga membuka akses terhadap pendanaan iklim global dan skema *green finance*. Dengan menjadi bagian dari rezim regional ini, Indonesia mendapatkan peluang memanfaatkan mekanisme pembiayaan berbasis karbon, seperti *carbon credit, blue bond,* dan pendanaan adaptasi berbasis alam (*nature-based solutions*). Strategi ini tidak hanya relevan dalam memperkuat diplomasi biru Indonesia, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi pembangunan ekonomi pesisir yang inklusif. Melalui diplomasi karbon biru, Indonesia berupaya memposisikan dirinya sebagai *agenda setter* dalam tata kelola iklim Samudra Hindia, menghubungkan kebijakan domestik seperti Indonesia *Blue Economy Roadmap* 2023–2045 dengan komitmen global dalam *Paris Agreement* dan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dengan demikian, IORA Blue Carbon Hub menjadi instrumen penting bagi Indonesia untuk mengintegrasikan kepentingan ekonomi, ekologi, dan geopolitik sekaligus memperkuat daya tawar Indonesia di ranah internasional.

PEMBAHASAN

Trend Kontribusi Blue Economy terhadap PDB Indonesia

Konsep *Blue Economy* di Indonesia tidak hanya berperan sebagai diplomasi seremonial namun telah memberikan kontribusi nyata dalam menaikkan perekonomian nasional. Dalam tujuh tahun terakhir, kontribusinya terus menunjukkan tren stabil. Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa sektor perikanan secara konsisten menyumbang rata rata 7,3 – 7,9% terhadap PDB. Fluktuasi hingga menyentuh angka 7,3% sempat terjadi pada tahun 2020 akibat dari pandemi COVID-19 yang melumpuhkan perekonomian termasuk sektor pariwisata dan perikanan. Namun, sektor ini pulih kembali dengan cepat pada 2023 hingga menyentuh 7,9% berkat program program pemulihan ekspor laut dan promosi ekowisata serta digitalisasi rantai pasok (BPS, 2023).

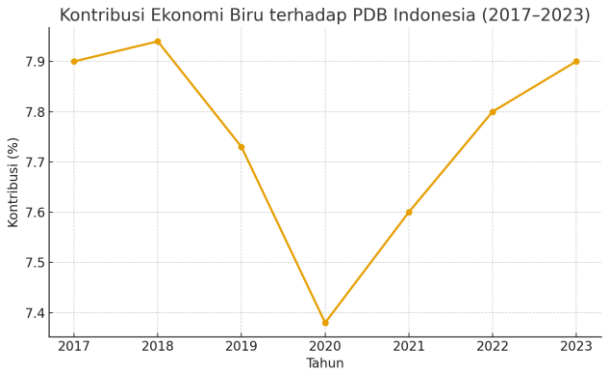

(Grafik 1. Kontribusi Ekonomi Biru terhadap PDB Indonesia. diakumulasi dari data https://www.jiwamudaindo.com/low-blue-sector-contribution-to-gdp-challenges-for-blue-economy-development-in-indonesia)

Pilar penting dalam peningkatan grafik tersebut adalah kinerja ekspor produk perikanan Indonesia. Nilai ekspor 2018 sekitar USD 4,86 miliar naik menjadi USD 5,72 miliar pada 2021, sama dengan pertumbuhan hampir 25%, puncaknya pada 2022 ada di angka USD 6,24 miliar lalu sedikit turun di 2023 menjadi USD 5,63 miliar (Antara, 2024). Data ini menunjukkan indikator keterhubungan antara diplomasi maritim Indonesia dan capaian domestik. Peran IORA terlihat jelas setelah BEC-II 2017 di Jakarta dengan *Jakarta Declaration on the Blue Economy* sebagai landasan kerjasama regional (IORA, 2017). Selain itu, deklarasi ini juga membuka peluang mitra dengan Australia melalui CSIRO *Blue Carbon Hub* 2019. Kolaborasi ini menciptakan upaya nyata dalam mendorong peningkatan hasil panen dan ekspor laut yang sejalan dengan arah kebijakan ekowisata dan karbon biru domestik (Indonesia.go.id, 2023).

Inisiatif IORA juga memberikan dampak nyata dalam keberhasilan ekonomi biru Indonesia. Pertama adalah *Workshop* IORA di Bali pada 2024 yang menjadi momentum dalam mitigasi *IUU Fishing*

kawasan Samudra Hindia. Menghasilkan pendoman regional dan meningkatkan nilai produk Indonesia di pasar global (IORA, 2024). Selain itu juga datang dari sektor ekowisata, misalnya Raja Ampat yang memberikan data kontribusi *blue economy* terhadap ekonomi lokal naik sebanyak 60% sekitar USD 31,5 juta dengan berasal dari homestay, pemandu wisata hingga konservasi lingkungan (Fadhil, 2025). Keterkaitan antara diplomasi biru dan implementasi nyata ini memperlihatkan kontribusi IORA bukan hanya program normatif.

Program Konkret IORA — Indonesia

Program	Sektor	Dampak	Referensi
Fisheries Training (2018–2021)	Perikanan	Surplus neraca perdagangan naik 9,1% dari pada tahun 2023	https://www.ibai.or.id/news/item/7037-indonesia-s-fisheries-trade-saw-a-9-1-increase-in-surplus-in-2024.html
PLTAL Larantuka (NTT) — 2028	Energi	akan memberikan 40 MW listrik dari arus laut	https://redaksipil.id/nasional/pltal-arus-laut-pertama-siap
Ekowisata Raja Ampat & Wakatobi	Pariwisata	Pariwisata menyumbang 40% dari PAD	https://www.antaranews.com/berita/1324510/wakatobi-catat-28-ribu-kunjungan-pada-awal-2020
Blue Carbon Initiative	Konservasi	Rehabilitasi mangrove 3,31 juta ha dengan serapan 300 juta ton CO_2/tahun	https://en.antaranews.com/news/300216/balancing-biodiversity-and-disaster-mitigation-efforts-with-mangroves

Proyeksi Kontribusi Blue Carbon (2020-2045)

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengelolaan *blue carbon* karena memiliki 3,31 juta hektar mangrove, yang merupakan terbesar di dunia dan mencakup sekitar 20% dari total ekosistem mangrove global. Ekosistem ini menyimpan sekitar 3,14 miliar ton CO_2, setara dengan 17% cadangan karbon pesisir dunia, dan mampu menyerap sekitar 300 juta ton CO_2 per tahun. Nilai jasa ekosistem pesisir, termasuk mangrove, lamun, dan rawa pasang surut, diperkirakan mencapai USD 1,5 miliar per tahun, baik melalui fungsi perlindungan pesisir maupun kontribusinya terhadap perikanan dan perdagangan karbon. Potensi ekonomi dari kredit karbon biru sendiri diproyeksikan bernilai lebih dari USD 532 juta dengan peluang pengurangan emisi hingga 11 juta ton CO_2 per tahun.

Melalui *IORA Blue Carbon Hub*, Indonesia memanfaatkan diplomasi maritim untuk mendorong aksi kolektif dalam konservasi pesisir dan mitigasi perubahan iklim. Pemerintah menargetkan rehabilitasi 600.000 hektar mangrove (2021–2024), ditambah restorasi 5.000 hektar per tahun (2025–2030). Program ini diperkirakan mampu menurunkan emisi sebesar 7,5 Tg CO_2e per tahun pada 2024 dan meningkat menjadi 8,9 Tg CO_2e per tahun pada 2030, dengan akumulasi mitigasi sekitar 411 Tg CO_2e dalam periode 2020–2030. Komitmen ini diperkuat melalui kerja sama internasional, termasuk kemitraan dengan *World Economic Forum* (2023) untuk mengembangkan roadmap pendanaan biru dan standar kredit karbon global, menjadikan Indonesia salah satu *agenda setter* dalam tata kelola iklim kawasan Samudra Hindia.

Selain kebijakan, sejumlah proyek percontohan *blue carbon* juga telah dijalankan. Contohnya, proyek konservasi mangrove di Kubu Raya, Kalimantan Barat dan Raja Ampat (Misool Island) untuk baseline kredit karbon dan biodiversitas, serta kawasan Derawan, Kalimantan Timur yang memiliki potensi pengurangan emisi hingga 72.505 ton CO_2e per tahun. Melalui inisiatif ini, Indonesia tidak hanya memposisikan diri sebagai pusat inovasi *blue carbon* di kawasan, tetapi juga membuka peluang besar

memperoleh pendanaan iklim global dan mengembangkan pasar *blue carbon credits*. Dengan langkah strategis ini, pada 2045 Indonesia ditargetkan menjadi pemimpin global dalam ekonomi biru sekaligus pelopor diplomasi iklim berbasis karbon biru.

SIMPULAN

Tulisan ini menganalisis peran *Indian Ocean Rim Association* (IORA) dalam mendukung strategi Poros Maritim Dunia (PMD) Indonesia melalui pengembangan ekonomi biru dan pemanfaatan *blue carbon* sebagai instrumen diplomasi maritim. Dengan potensi 3,31 juta hektar mangrove terbesar di dunia Indonesia memiliki peluang besar dalam mitigasi perubahan iklim melalui serapan karbon mencapai 300 juta ton CO_2 per tahun. Melalui inisiatif IORA *Blue Carbon Hub,* Indonesia tidak hanya memperkuat diplomasi biru, tetapi juga mendorong kerja sama internasional, proyek percontohan kredit karbon pesisir, dan pendanaan iklim berkelanjutan. Proyeksi hingga 2045 menunjukkan bahwa *blue carbon* akan menjadi pilar utama pembangunan ekonomi biru nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai *agenda setter* dalam tata kelola iklim kawasan Samudra Hindia.

REFERENSI

Blue Economy sebagai Pilar Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan - Samudera Indonesia Insights. (2023, September 26). Samudera Insight - Samudera Indonesia Insights. Retrieved September 23, 2025, from https://insight.samudera.id/blue-economy-sebagai-pilar-pertumbuhan-ekonomi-berkelanjutan/

Saifullah, A. K. (2023, 18 Desember). *Pantesan lambat, pertumbuhan ekonomi biru masih stagnan*. Bakabar. https://bakabar.com/post/pantesan-lambat-pertumbuhan-ekonomi-biru-masih-stagnan-lqamqaoy

Nisa, A. C. (2020). Diplomasi maritim Indonesia dalam Indian Ocean Rim Association (IORA). *Journal of Government Science (GovSci)*, *1*(2), 51–63. https://doi.org/10.54144/govsci.v1i2.6

Wikipedia. (2024, 29 Mei). *Liberalisme institusional*. Wikipedia. Diakses pada 23 September 2025 https://id.wikipedia.org/wiki/Liberalisme_institusional

Bueger, C. (2024). Not yet comparable? Maritime security knowledge and the messiness of epistemic infrastructures. In C. Bueger, T. Edmunds, & A. Drieschova (Eds.), *Comparisons in global security politics* (pp. 109–127). Cambridge: Cambridge University Press.

Indonesia Climate Change Trust Fund; Kementerian PPN/Bappenas. (2022, Agustus 16). *Indonesia Blue Finance Policy Note*. Indonesia Climate Change Trust Fund. https://www.icctf.or.id/wp-content/uploads/2022/12/Blue-Finance-Policy-Note_Publish.pdf

Basaib, M. (2023, 3 Juli). *Sustainable development of the ocean: UN supports inclusive development of Indonesia's National Blue Economy Roadmap*. United Nations Indonesia. Diakses pada 23 September 2025, dari https://indonesia.un.org/en/238833-sustainable-development-ocean-un-supports-inclusive-development-indonesia%E2%80%99s-national-blue

World Bank. (2025). *Indonesia Sustainable Oceans Program: Overview*. Diakses pada 23 September 2025, dari https://www.worldbank.org/en/programs/indonesia-sustainable-oceans-program/overview

Duha, J., & Saputro, G. E. (2022). Blue economy Indonesia to increase national income through the Indian Ocean Rim Association (IORA) in the order to empower the world maritime axis and strengthen state defense. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)*, *7*(2), 514–527. https://doi.org/10.22219/jmksp.v7i2.19936

Utantoro, A. (2025, 30 Januari). *Produksi sampah terus meningkat, anggaran penanganan masih minim*. Media Indonesia. Diakses pada 23 September 2025, dari https://mediaindonesia.com/humaniora/739516/produksi-sampah-terus-meningkat-anggaran-penanganan-masih-minim

Antara. 2024. KKP Catat Tren Ekspor Perikanan RI Surplus Sepanjang 5 Tahun Terakhir. Diakses pada 4 September 2025 https://www.antaranews.com/berita/4419225/kkp-catat-tren-ekspor-perikanan-ri-surplus-sepanjang-5-tahun-terakhir

BPS. 2023. Statistik Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Pesisir 2023. Ekonomi Laut Berkelanjutan dan Tantangan Pengelolaan Kawasan Pesisir Vol 20 Diakses pada 4 September 2025. https://www.bps.go.id/id/publication/2023/11/30/45b0e0c30911979641959fe5/statistik-sumber-daya-laut-dan-pesisir-2023

Indonesia.go.id. 2024. Genjot Produksi Perikanan Via Ekonomi Biru. Diakses pada 4 September 2025https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7880/genjot-produksi-perikanan-via-ekonomi-biru

Fadhil. 2025. Sukses Tanpa Tambang! Kisah Masyarakat Adat Raja Ampat Hidup Sejahtera dari Alam. Kabarpalu. Diakses pada 4 September 2025

IORA. 2017. Concept Note for the 2nd IORA Blue Economy Ministerial Conference. Jakarta: IORA Secretariat

IORA. 2023. *The IORA Blue Carbon Hub Think Tank Meeting on Nature-based Solutions for Coastal Adaptation,12-14 September 2023, Bali, Indonesia*. Diakses pada 3 September 2025

IORA. 2024. *3rd Workshop on Developing IORA Guidelines to Combat Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing.* Diakses pada 3 September 2025

N Fathiraini et al. 2022. The vantage point of geopolitics: capturing Indonesia's maritime axis. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.* Purpose Led Publishing.

S. Vibhanshu dan L. Joseph. 2014. Indonesia as a Maritime Power: Jokowi's Vision, Strategies, and Obstacles Ahead. Brookings Diakses pada 2 September 2025 https://www.brookings.edu/articles/indonesia-as-a-maritime-power-jokowis-vision-strategies-and-obstacles-ahead